

## **Optimalisasi Koordinator Sumber Daya Air Wilayah Glenmore Dalam Pelayanan Pengelolaan Irigasi Di Wilayah Tegalsari Kabupaten Banyuwangi**

Eka Radyta Budiyanti<sup>1</sup>, Sri Wilujeng<sup>2</sup>, Herwin Kurniadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Jalan Laksda Jl. Adi Sucipto, Taman Baru, Banyuwangi Sub-District, Banyuwangi Regency, East Java 68416  
dhytcanis@gmail.com

### **Abstract**

This research aims to determine the optimization of irrigation management services carried out by the Water Resources Coordinator for the Glenmore region through the regional interpreter with HIPPA for the Tegalsari region. Research conducted at the Glenmore regional Water Resources Coordinator used a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used were direct observation, in-depth interviews and secondary sources (documents, theses, journals). From the survey that has been carried out, the research results show that irrigation management services in the Tegalsari area carried out by Juru together with HIPPA in the Tegalsari area are less than optimal. The Tegalsari area is included in the work area of the Glenmore regional air resources coordinator which is in the downstream area and has quite extensive raw rice fields but the water supply in the area is inadequate, causing a shortage in air demand. Apart from that, the results of this research found that the large area of Tegalsari causes irrigation management services to be not optimal, and the distribution of water discharge in farmers' fields is not timely. In conditions like this it is very important to manage air sources and irrigation water distribution systems. KORSDA through the HIPPA joint interpreter and farmers in the Tegalsari area need to hold regular meetings for socialization and coordination regarding irrigation management and drawing up plans for the distribution of needed irrigation water. The water mill system is one way to distribute irrigation water.

**Keywords:** irrigation management services, Water Resources, Glenmore region

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pelayanan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh Koordinator Sumber Daya Air wilayah Glenmore melalui Juru wilayah bersama HIPPA wilayah Tegalsari. Penelitian yang dilakukan di Koordinator Sumber Daya Air wilayah Glenmore menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung, wawancara mendalam dan telaah sumber sekunder (dokumen, skripsi, jurnal). Dari survey yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pengelolaan irigasi di wilayah Tegalsari yang dilakukan Juru bersama HIPPA wilayah Tegalsari kurang optimal. Wilayah Tegalsari termasuk wilayah kerja Koordinator Sumber Daya Air wilayah Glenmore yang berada di wilayah hilir dan memiliki baku sawah cukup luas akan tetapi persediaan debit air di wilayah tersebut kurang memadai sehingga menyebabkan kesenjangan dalam kebutuhan air. Selain itu, hasil penelitian ini menemukan bahwa luasnya wilayah Tegalsari menyebabkan tidak optimalnya pelayanan pengelolaan irigasi, tidak tepatnya waktu dalam pembagian debit air di sawah petani. Pada kondisi seperti ini sangat penting untuk mengelola sumber-sumber air dan sistem pembagian air irigasi. KORSDA melalui Juru bersama HIPPA dan petani di wilayah Tegalsari perlu melakukan pertemuan rutin untuk sosialisasi dan koordinasi mengenai pengelolaan irigasi dan menyusun rencana distribusi air irigasi yang dibutuhkan. Sistem gilir air menjadi salah satu cara untuk melakukan pembagian air irigasi.

**Kata kunci :** pelayanan pengelolaan irigasi, Sumber Daya Air, wilayah Glenmore

---

Copyright (c) 2024 Eka Radyta Budiyanti, Sri Wilujeng, Herwin Kurniadi

Corresponding author: Eka Radyta Budiyanti

Email Address: [dhytcanis@gmail.com](mailto:dhytcanis@gmail.com) (Jalan Laksda Jl. Adi Sucipto, Taman Baru, Banyuwangi Sub-District, Banyuwangi Regency, East Java 68416)

Received 15 July 2024, Accepted 20 July 2024, Published 27 July 2024

## **PENDAHULUAN**

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat akan merasakan kepuasan apabila menerima pelayanan yang baik dan profesional dari penyediaan pelayanan. Jika mereka memperoleh kepuasan atas layanan yang diberikan, maka akan timbul kepercayaan dari masyarakat sebagai pengguna jasa untuk menggunakan kembali layanan tersebut.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 15 mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan. Pengelolaan air bagi warga dalam lingkup tugas-tugas pemerintahan dalam sebuah Negara meliputi berbagai urusan. Salah satu di bidang irigasi.

Dengan adanya wewenang pemerintah daerah kepada instansi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air yang salah satunya ialah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi ada 11 (sebelas) bagianwilayah UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) untuk dapatnya mempermudah pengawasan dan jangkauan dalam kegiatan operasional, salah satunya wilayah Kordsa (Koordinator Sumber Daya Air) Glenmore. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD )mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tugas teknis operasional yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pelayanan pengelolaan irigasi selain melalui Kordsa (Koordinator Sumber Daya Air). Pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi menyebutkan pada pasal 1 (satu) bahwasannya, Koordinator Sumber Daya Air (KORSDA) merupakan pengamat atau petugas lapangan yang bertugas dalam operasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air. Kordsa sendiri memiliki peran sangat penting di Dinas PU Pengairan karena luasnya wilayah yang harus di kelola maka KORSDA sangat membantu Dinas PU Pengairan dalam menangani segala hal yang menyangkut kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan mengenai irigasi.Luas baku sawah yang dimiliki Kordsa Glenmore cukup luas kurang lebih 6.719 Ha.

Kejuron Tegalsari merupakan suatu wilayah kerja yang masuk Koordinator Sumber Daya Air wilayah Glenmore, akan tetapi tidak semua wilayah Tegalsari termasuk wilayah kerja pengelolaan irigasi Koordinator Sumber Daya Air wilayah Glenmore. Sebagaian wilayah Tegalsari masuk kedalam wilayah kerja Koordinator Sumber Daya Air wilayah Genteng. Luas baku sawah diwilayah Tegalsari seluas 901 Ha.

Irigasi sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi dari masyarakat. Pemberian air irigasi yang efisien selain dipengaruhi oleh tata

cara aplikasi, juga ditentukan oleh kebutuhan air guna mencapai kondisi air tersedia yang dibutuhkan tanaman.

Di dalam melakukan pelayanan irigasi di setiap wilayah, diperlukan kordinasi antar Koordinator Sumber Daya Air (KORSDA), Juru wilayah, HIPPA wilayah bersama masyarakat atau petani. Himpunan petani pemakai air (HIPPA) ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan baik secara organisasi maupun teknis. Letak wilayah Kordsa Glenmore berada pada dataran tinggi, banyak perkebunan yang memiliki hasil alam, dan ada bagian yang berada di dataran rendah dengan memiliki beragam potensi produk hasil pertanian.

Kordsa Glenmore salah satu Koordinator yang bertugas untuk mengelola irigasi dengan mengairi hamparan sawah yang luas dan berpengaruh positif untuk kesuburan tanah. Daerah irigasi Kordsa Glenmore merupakan salah satu layanan sistem Operasi jaringan irigasi, dengan sumber air dari mata air pegunungan akan tetapi untuk wilayah hilir sesuai pola operasi pada waduk atau kata lain biasa di sebut dengan embung. Dengan pola tanam rencana padi-padi-palawija, pola ini disusun karena ketersediaan air pada musim kemarau yang selalu menipis sehingga hanya mampumengairi pada Musim Tanam (MT) III dengan tanaman palawija.

Pelaksanaan pola tanam ditingkat petani selama ini tidak sesuai dengan rencana, karena banyak petani yang lebih memilih menanam padi pada Musim Tanam III di bandingkan menanam palawija, sehingga mengakibatkan porsi pemakaian air persatuan luas meningkat, sedangkan ketersediaan air tidak mencukupi. Akibat dari kondisi tersebut maka sering terjadi suatu masalah dalam pemakaian air. Masalah tersebut sering ditandai dengan adanya pengambilan air secara illegal, dan pemompaan air dangkal secara berlebihan.

Fenomena ini selalu terjadi setiap tahun dan minat petani dalam menanam padi di Musim Tanam III masih sangat antusias sekali. Tetapi pelayanan pengelolaan irigasi untuk wilayah Tegalsari masih kurang optimal. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana Optimalisasi Koordinator Sumber Daya Air (KORSDA) wilayah Glenmore melalui Juru dan HIPPA di wilayah Tegalsari dalam melakukan pelayanan pengelolaan irigasi?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian meliputi data primer dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap hasil wawancara terlebih dahulu kepada Koordinator Sumber Daya Air wilayah Glenmore, juru wilayah Tegalsari, Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan petani/masyarakat. Dan kemudian dilakukan analisis data skunder yang diperoleh dari literatur tentang Pengairan.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian asar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti

yang disarankan oleh data. Setelah data primer diperoleh selanjutnya data tersebut diidentifikasi dan diklasifikasi serta dianalisis secara kualitatif dengan memplajai seluruh jawaban dari narasumber, membandingkan dengan data sekunder.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Peran KORSDA dalam pengelolaan jaringan irigasi***

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 pasal (1) bahwa “Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air”. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) telah tercantum perihal pentingnya pengelolaan air oleh Negara. Secara filosofi pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pelayanan terhadap publik dan pengelolaan air yang tepat, efektif, dan efisien demi kemanfaatan dan kesejahteraan warganya.

Dengan adanya wewenang pemerintah kepada instansi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air yang salah satunya ialah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 84 Tahun 2021 tentang, Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam melaksanakan tugas sebagaimana fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sumber Daya Air dan air minum/air bersih
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sumber Daya Air dan air bersih
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Air dan air bersih
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan dibaginya menjadi 11 (sebelas) bagianwilayah UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan kabupaten banyuwangi ini, untuk dapatnya mempermudah pengawasan dan jangkauan dalam kegiatan operasional, salah satunya wilayah Korsda (Koordinator Sumber Daya Air) Glenmore. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tugas teknis operasional yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Cakupan wilayah kerja Kordsa Glenmore meliputi kejuron Sepanjang, kejuron Kalibaru, kejuron Sumbergondo, kejuron Kaligondo, kejuron Setail, kejuron Tegalsari dan kejuron Tamansari.

Di setiap wilayah terdapat petugas yaitu Juru, PPA dan Pekarya. Petugas-petugas tersebut diberi tugas untuk melakukan pelayanan pengelolaan irigasi dan pemeliharaan irigasi. Pelaksanaan operasi jaringan irigasi sedapat mungkin harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan operasi, Surat

Keputusan Pemerintah (Ditjen SDA, Gubernur atau Bupati/ Walikota) harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi.

Sebagai kelanjutan dari proses pembangunan jaringan irigasi, kegiatan operasi jaringan irigasi merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar fungsi pelayanan irigasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk menunjang usaha-usaha sektor pertanian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa:

1. Air saat ini merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomi dan berfungsi sosial
2. Adanya penggunaan air irigasi untuk berbagai kepentingan
3. Terjadinya kerawanan ketersediaan air
4. Adanya perubahan tujuan pembangunan dibidang pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan.

Irigasi merupakan suatu proses untuk mengalirkan air dari suatu sumber air ke sistem pertanian. Secara garis besar irigasi adalah usaha pemenuhan kebutuhan air bagi tanaman agar tumbuh optimal. Menurut Suhardjono (1994), irigasi adalah sejumlah air yang pada umumnya diambil dari sungai atau bendungan yang dialirkan melalui sistem jaringan irigasi untuk menjaga keseimbangan jumlah air didalam tanah.

Dengan demikian tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lengas tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Menurut Peraturan menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007, jaringan irigasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
2. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
3. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.

### ***Optimalisasi Peran KORSDA***

Pelayanan publik secara normative diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 15 mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi

masyarakat. 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2006:182) yaitu :

1. *Reliability*, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan/instansi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang disajikan secara akurat dan terpercaya. Petugas dari Koordinator Sumber Daya Air yang melakukan pengelolaan irigasi dan perawatan di wilayah Tegalsari yaitu Juru, PPA, dan Pkaryawan. Mereka ditugaskan untuk mengelola irigasi dan pemeliharaan irigasi, kegiatan tersebut seperti melakukan pembagian debit air, membersihkan lingkungan sekitar saluran dan dam, perawatan pada pintu air di wilayah kejuron Tegalsari.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, Kordsa dalam melakukan pelayanan pengelolaan irigasi dibantu oleh HIPPA. HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) atau asosiasi petani menggunakan air irigasi adalah sebuah asosiasi yang dipasang untuk mengendalikan air irigasi dan bangunan, operasi, dan pengelolaan fasilitas irigasi berdasarkan permintaan Presiden tahun 1980.

Pembinaan Gabungan Himpunan petani pemakai air (HIPPA) ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan baik secara organisasi maupun teknis. HIPPA adalah organisasi yang berdiri tanpa ikatan Dinas akan tetapi dibentuk dan disahkan oleh Bupati Banyuwangi melalui Peraturan Daerah Banyuwangi No. 7 Tahun 1997 tentang pembentukan dan pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air Kabupaten Banyuwangi. Lembaga HIPPA sebagai suatu lembaga yang mengatur dan mengelola jaringan air irigasi sesuai dengan kemampuannya serta untuk meningkatkan kemampuan memperbaiki kinerja pengelola dan lembaga sumber daya air. HIPPA bertugas membantu Kordsa dalam melakukan pelayanan pengelolaan irigasi.

HIPPA wilayah Tegalsari selain melakukan pengelolaan irigasi dengan mengatur debit, juga melakukan pemeliharaan irigasi dengan membantu Juru, PPA dan Pkaryawan wilayah Tegalsari membersihkan rumput sekitar saluran, membuang sampah dan menjaga bangunan di saluran wilayah Tegalsari. Juru dan HIPPA sering mengikuti kegiatan pelatihan seperti BIMTEK atau workshop lainnya tentang ilmu di bidang Pengairan.

HIPPA terkadang di ikut sertakan dalam pelatihan karena organisasi tersebut ikut membantu petugas lapangan Kordsa dalam pengelolaan irigasi jadi tujuan di ikut sertakan HIPPA agar mendapat ilmu juga dalam cara pengelolaan irigasi dan pemeliharaan irigasi.

2. *Responsiveness*, atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan/masyarakat dengan penyampaian informasi yang jelas. Karena lembaga HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) memiliki fungsi, tugas dan tujuan dalam pengadaan air irigasi sebagaimana lembaga kemasyarakatan yang telah mewadahi petani-petani di wilayah Kordsa Glenmore pada tempat irigasi.

Petani yang tergabung dalam kelompok HIPPA dari berbagai kalangan petani baik dari usaha pertanian, perikanan sampai peternakan. Keluhan dan hambatan yang dialami petani-petani dapat ditampung oleh HIPPA pada setiap wilayah masing-masing.

Agar hambatan yang ada diatasi bersama-sama tidak diselesaikan sendiri oleh petani. Tanggapan atau respon yang dilakukan HIPPA di wilayah Tegalsari cukup baik. Untuk mengatasi masalah yang terjadi Kordsa mengajak HIPPA dan masyarakat untuk mengadakan pertemuan rutin satu bulan sekali, dapat kiranya disana bisa melakukan koordinasi agar dapat bertukar pikiran mengenai keadaan air di wilayah masing-masing dan dilakukannya sosialisasi terkait pengelolaan irigasi.

Kordsa bersama HIPPA menyusun rencana distribusi air irigasi yang di butuhkan, maka pembagian air irigasi dilaksanakan dengan sistem gilir.

3. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan/instansi. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, kompetensi dan sopan santun.

Untuk jaminan dan kepastian pelayanan pengelolaan irigasi yang diberikan Kordsa melalui Juru, PPA, dan HIPPA di wilayah Tegalsari masih kurang efektif dan kurang optimal, karena ada sebagian sawah garapan petani sering terjadi keterlambatan waktu dalam menerima gilir air.

Sawah garapan yang seharusnya belum waktunya mendapat jatah gilir air ini sudah di aliri air tanpa ada konfirmasi dengan Juru, PPA dan HIPPA di wilayah tersebut, sedangkan garapan sawah yang waktunya mendapat gilir air malah belum di aliri air.

4. *Empaty*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang di berikan kepada pelanggan atau masyarakat dengan upaya dapat memahami keinginan pelanggan atau masyarakat. Sebagai contoh suatu perusahaan atau organisasi harus mengetahui keinginan pelanggan atau masyarakat secara spesifik dari fisik produk atau jasa sampai pendistribusian yang tepat.

Guna dilakukannya pertemuan rutin yang dilakukan Kordsa bersama HIPPA dan petani di wilayah Tegalsari untuk dapatnya terjalin hubungan yang baik, dapat mengetahui keluhan kesah petani terkait kebutuhan air ataupun keluhan yang lain terkait irigasi di wilayah masing-masing.

Setiap keluhan masyarakat ditampung oleh HIPPA dan Kordsa kemudian di cari solusi bersama di acara pertemuan rutin. Perlunya koordinasi yang baik antara Kordsa, HIPPA dan petani agar setiap kendala yang terjadi cepat teratasi.

5. *Tangible*, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan/instansi dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang di maksud bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan/organisasi dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.

Kemampuan Koordinator Sumber Daya Air wilayah Glenmore dalam berpartisipasi dengan HIPPA dan petani di wilayah Tegalsari sudah cukup baik, dalam pemeliharaan irigasi Kordsa bersama Juru, PPA dan HIPPA dapat bekerja sama dengan maksimal maka saluran dan sungai wilayah di

Tegalsari dalam keadaan bersih sehingga Kepala Dinas Pu Pengairan Banyuwangi mempercayakan salah satu embung di wilayah Tegalsari dijadikan destinasi wisata pemancingan.

## **KESIMPULAN**

Dari keseluruhan Hasil penelitian dan pembahasan diatas menunjukkan bahwa proses pelayanan pengelolaan irigasi di wilayah Kordsa Glenmore terutama di wilayah Tegalsari masih kurang efektif, karena dalam melakukan pembagian debit air untuk sawah garapan petani masih mengalami ketidaktepatan waktu.

Maka hal ini yang mengakibatkan para petani melakukan perebutan air untuk mengalir sawah di wilayah Tegalsari. Upaya yang dilakukan selama ini adalah dengan memberikan tugas tambahan kepada Juru, PPA dan Pegawai wilayah Tegalsari dalam pengelolaan irigasi dengan cara melakukan sistem gilir bersama HIPPA dan petani setempat. Diharapkan lebih sering diadakannya sosialisasi untuk petani agar lebih mendalami ilmu mengenai pengelolaan dan pemeliharaan irigasi.

Koordinator Sumber Daya Air Wilayah Glenmore harus meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan irigasi di wilayah kerja tidak hanya di wilayah Tegalsari yang termasuk wilayah hilir. Lebih sering melakukan koordinasi dengan Juru, HIPPA dan para petani dengan memberikan sosialisasi terkait pengelolaan dan pemeliharaan irigasi agar petani-petani lebih memahami.

Perlu adanya upaya optimalisasi peran lembaga/Kordsa untuk pengelolaan irigasi dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif dari petani terutama dalam jadwal pembagian air irigasi dan identifikasi kebutuhan air irigasi. Lebih tegas untuk memberikan sanksi kepada petani yang melanggar aturan yang sudah ada.

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Petani harus lebih bijak dalam melakukan segala hal yang menyangkut kebutuhan banyak orang. Sering mengikuti sosialisasi dan koordinasi dengan petugas dari KORSDA.

## **REFERENSI**

- Arieyanti Dwi Astuti, Jatmiko Wahyudi, & Herna Octivia Damayanti (2021). Kinerja dan potensi Daerah Irigasi di Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* Vol. 17 No. 2 Desember 2021 Hal 85-10
- Adi, Fahrudin Dwi Cahyono. *Optimalisasi Kebutuhan Air Irigasi Dan Jadwal Tanam Di Bendung Karet Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang*. Diss. Institut teknologi nasional malang, 2020.
- Burhanudin, H. L., Iqbal, A. M., & Bahri, Y. S. (2022). Pelaksanaan Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Mentari Publika*, 2(2), 283-296.



- Maryam, N. S. (2016). Wujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, VI, 1-17.
- Nababan, M. (2013). *Pengelolaan Irigasi Pertanian Padi Sawah Di Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Nur, M. (2020). *Kualitas Pelayanan Publik Program Wireless Fidelity (Wifi) Bandung Juara Di Ruang Publik Kota Bandung*. [Skripsi] Universitas Komputer Indonesia, pp. 10-50
- Pangkey, I., & Rantung, M. I. R. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik*. Penerbit Tahta Media.
- Pristianto, H. (2018). *Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kota Sorong*.
- Pratama, Donny Fajar. *Hubungan Antara Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Dengan Tingkat Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Air Irigasi: kasus pada Gabun*. Diss. Universitas Brawijaya, 2009.
- Sugiyanto, S., Mustikaningrum, D., Susanto, H., Setiyanta, N. C., & Marbun, M. P. (2023). Sosialisasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bagi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Sekar Padi Desa Bandungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Jawa Timur. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 1(3), 147-156.
- Setyobudi, Yustinus Farid. "Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik." *Jurnal Dimensi 2.1* (2013).
- Sutoyo. (2006). *Optimalisasi Pelayanan Irigasi Daerah Irigasi Colo Timur Kabupaten Sragen* [tesis]Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta, pp. 1-4
- SINURAT, Basa Maria Chaterine, et al. ANALISA DESAIN JARINGAN IRIGASI DI SERDANGKABUPATEN DELI SERDANG. *JURNAL ILMIAH TEKNIK SIPIL*, 2023, 12.2: 184-189.
- Samekto, Candra, and Ewin Sofian Winata. "Potensi sumber daya air di Indonesia." *Seminar Nasional: Aplikasi Teknologi Penyediaan Air Bersih Untuk Kabupaten/Kota Di Indonesia*. 2010.
- Rusli, D., Sanusi, A., Haryono, D., & Andriani, D. (2021).Efektifitas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Upt Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Permukiman Wilayah Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.*Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(10), 1735-1757.
- Ria Yuana, Sari. *PARTISIPASI PETANI DALAM KEBIJAKAN OPTIMALISASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI (JITUT) DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR*. Diss. STIPER DHARMA WACANA METRO, 2016.
- Zulhadi, L. (2021). *Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Bidang Pengairan Irigasi Pertanian Di Kabupaten Lombok Timur*. 3, 79-93.

[Perbup].Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi.

[Permen PUPR]. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Indonesia, Republik. *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal Mpr Ri, 2002.